

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kota Makassar merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Terletak di pesisir barat daya pulau Sulawesi, menghadap Selat Makassar. Kota Makassar telah mengalami beberapa kali perubahan nama dari nama Makassar berubah menjadi Ujung Pandang pada tahun 1971 dan kembali lagi menjadi Makassar pada tahun 1999. Alasan pengantian Makassar menjadi Ujungpandang adalah politis. Pemerintah beranggapan bahwa tidak semua penduduk Kota Makassar adalah berasal dari etnik Makassar, selain itu hadirnya masyarakat dari luar menambah kuat perlunya perubahan nama dari Makassar menjadi Ujungpandang. Namun demikian tepat 13 Oktober 1999 kota ini dinamakan kembali Makassar berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang perubahan nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>1</sup>

Pada tahun 1980-an pada saat nama Makassar menjadi Ujung Pandang, laju modernisasi berkembang pesat. Ditandai dengan sarana dan fasilitas perkotaan sudah semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Konsentrasi pusat-pusat perekonomian telah berkembang, salah satunya adalah “Pusat Pertokoan Sombaopu” yang



---

Jumardi, “Situs Benteng Fort Rotterdam Sebagai Sumber Belajar dan Pariwisata Kota Makassar : Tinjauan Fisik Arsitektur dan Kesejarahan”, *ndrasangkala*, Vol 4 No. 2, (2018): 138.

diresmikan tahun 1970. Kebutuhan yang meningkat di dekat laut, menyebabkan sepanjang pantai berdiri pertokoan, bar, restoran, dan klub malam.<sup>2</sup>

Modernisasi membuat laju pertumbuhan penduduk dan ruang di Kota Ujung Pandang menjadi semakin meningkat. Derap pembangunan terus menggeliat begitu dekade 1980-an dimulai. Suatu Rencana yang berkaitan dengan memenuhi kebutuhan penduduk kota soal sarana rekreasi, tamasya, olahraga, dan lain-lain. Sebuah impian baru dirancang dengan rencana pembangunan “Taman Impian Tanjung Bunga” Ujung Pandang.<sup>3</sup>

Rencana Pembangunan Taman Impian ini terletak di Kawasan Tanjung Bunga. Kawasan ini terletak di dua kecamatan di Kota Makassar yaitu sebagian berada di kecamatan Tamalate dan sebagainya lagi berada di kecamatan Mariso. Kawasan Tanjung Bunga merupakan kawasan yang berada di tepi laut. Hal ini yang membuat Kawasan Tanjung Bunga menarik untuk dikembangkan. Rencana ini berbanding lurus dengan rencana pengembangan Kota Ujung Pandang. Hal ini juga tidak terlepas dari jumlah penduduk Kota Ujung Pandang yang terus meningkat tiap tahunnya<sup>4</sup> sehingga dirasa perlu adanya pengembangan *publik space*. Perkembangan suatu kota pada hakekatnya disebabkan oleh dua variabel determinan, yaitu : *pertama* karena adanya penambahan penduduk baik secara alamiah maupun migrasi. *Kedua*

---

<sup>2</sup> Ilham Daeng Makkelo, “Menjadi Kota Modern : Transformasi Kota Makassar Pada Abad Ke-20“. *Jurnal Sejarah*. Vol 1. No. 2, (2018): 57.

<sup>3</sup> Ilham, Transformasi Kota Makassar, 59

<sup>4</sup> Pada pertengahan abad ke-19, populasi di kawasan ini diperkirakan sekitar wa. Pada tahun 1984, jumlah penduduk Kota Ujung Pandang meningkat 748.611 jiwa. Selanjutnya, pada tahun berikutnya, angka ini bertambah 753.362 jiwa. Pada tahun 1985, populasi kembali naik menjadi 778.593 tumbuhan penduduk yang signifikan terus berlanjut hingga tahun 1999, mlah penduduk mencapai 1.191.456 jiwa.



karena adanya perubahan dan perkembangan kegiatan usahanya yang disebabkan oleh terjadinya perubahan pola sosial ekonomi penduduk sebagai masyarakat kota.<sup>5</sup>

Kawasan Tanjung Bunga dahulu diselimuti rawa-rawa, empang, dan hutan rambat. Bagai kawasan terisolir, sehingga tidak memiliki akses yang memadai. Masyarakat sekitarpun seperti hidup di pedalaman hutan dan jauh dari kemajuan. Mereka kesulitan dalam berbagai hal, seperti beraktivitas ke jantung Kota Makassar. Apabila anak-anak ingin bersekolah ke Kota Makassar, maka mereka mesti menyeberangi sungai Jeneberang. Satu-satunya transportasi memadai kala itu adalah menaiki katinting.<sup>6</sup>

Sekitar tahun 1980an kawasan ini merupakan area pesisir sehingga banyak ditempati oleh nelayan tradisonal. Daerah ini juga merupakan muara dari sungai Jeneberang. Hal ini menyebabkan pengendapan lumpur terjadi di muara Tanjung Bunga. Sehingga, daerah perairan tersebut menjadi dangkal, bahkan dengan cepat menimbulkan daratan-daratan yang baru. Hal ini menarik para nelayan untuk membangun tempat pemukiman liar pada daratan yang baru muncul tersebut. Tentunya hal ini akan berdampak buruk karena akan menimbulkan daerah *slums* (daerah kumuh) dan akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan Kota Ujung Pandang. Letaknya yang tepat berada di depan *down town*<sup>7</sup> kota lebih memperburuk

---

<sup>5</sup> Sujarto, J, “*Penelaahan dan Analisis Perencanaan Kota dan Kota Baru*”, Bahan Mata Kuliah Jurusan Teknik Planologi ITB Bandung, (1995).

<sup>6</sup> Sukmawati Ibrahim, “Tanjung Bunga Kota Mandiri Dulu, Kini, dan Nanti.” Diakses pada 4 Oktober 2024, [makassar.tribunnews.com/2022/08/04/tanjung-bunga-kota-mandiri-dulu-nanti](http://makassar.tribunnews.com/2022/08/04/tanjung-bunga-kota-mandiri-dulu-nanti).

<sup>7</sup> *Down town* kota merujuk pada area pusat kota yang biasanya merupakan area untuk kegiatan komersial, bisnis, dan hiburan. *Down town* juga sering



keadaan. Hal ini bila dibiarkan begitu saja dan tidak ditanggulangi dengan segera akan menimbulkan banyak masalah bagi perkembangan kota Ujung Pandang.<sup>8</sup>

Dilatar belakangi hal ini, diajukan suatu kajian yang merupakan suatu usulan gagasan pengembangan daerah Kawasan Tanjung Bunga. Diusulkan untuk menjadi suatu kawasan hunian kelas satu, yaitu suatu kawasan hunian yang terencana dengan baik, yang memiliki segala kelengkapan fasilitas yang layak bagi suatu *prestige residential*<sup>9</sup> area, sekaligus sebagai kawasan rekreasi pantai bagi warga Kota Ujung Pandang sendiri, maupun bagi para wisatawan yang mengunjungi Kota Ujung Pandang.<sup>10</sup>

Untuk menanggulangi hal ini CV. Tanjung Bunga mengajukan permohonan kepada Walikota Madya Ujungpandang pada 15 Januari 1980 No. 01/Tb/1980 untuk diberi kesempatan memanfaatkan lokasi tersebut. Untuk memantapkan rencananya CV.<sup>11</sup> Tanjung Bunga mengajukan lagi surat Kepada WKDH Tk. II Ujung Pandang

---

dianggap sebagai jantung kota, di mana banyak orang berkumpul untuk bekerja, berbelanja, dan bersosialisasi.

<sup>8</sup> Arsip Proyek Rekreasi Tanjung Bunga (1980-1998). "Proposal Kegiatan Inventarisasi Kawasan Rekreasi Tanjung Bunga dan Anggaran Biaya Pelaksanaanya." (Makassar : Dinas Kearsipan Kota Makassar).

<sup>9</sup> *Prestige residential* merujuk pada area perumahan yang dirancang untuk menawarkan lingkungan tinggal yang mewah dan berkualitas tinggi. Biasanya, rumah-rumah di area ini sering dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti taman, kolam renang, gym, dan keamanan 24 jam.

<sup>10</sup> Arsip Proyek Rekreasi Tanjung Bunga (1980-1998). "Proposal Kegiatan Inventarisasi Kawasan Rekreasi Tanjung Bunga dan Anggaran Biaya aanya." (Makassar : Dinas Kearsipan Kota Makassar).

Arsip Proyek Rekreasi Tanjung Bunga (1980-1998). "Walikotamadya andang: Surat nomor 01/TB/1980 tanggal 15 Januari 1980 tentang an memanfaatkan lokasi Tanjung Bunga." (Makassar : Dinas Arsip Kota ).



sesuai surat tanggal 7 Oktober 1980 No. 017/Tb/1980.<sup>12</sup> Ini juga dilakukan dalam rangka turut berpartisipasi membantu usaha pemerintah di bidang pembangunan, atas lokasi daratan timbul “Tanjung Bunga / Tanjung Alang” yang direncanakan akan dijadikan lokasi pariwisata.<sup>13</sup>

Pada 7 Desember 1983 No. 231/DN/XII/1983 P.T Indonesia Product Centre “SARINAH JAYA” juga mengajukan permohonan izin lokasi proyek pengembangan wilayah pantai Kota Ujung Pandang<sup>14</sup> meliputi areal tanah sesuai *site plan*<sup>15</sup>. Setelah diteliti maka disetujui peruntukan lokasi tersebut untuk proyek pengembangan wilayah pantai Kota Ujung Pandang. Sesuai surat rekomendasi No. 2/Rek/C/IV/C tanggal 22 Februari 1984.<sup>16</sup>

Pada tahun 1991 pengembangan kawasan Tanjung Bunga diambil alih oleh *Gowa Makassar Tourism Development Corporation* (GMTDC).<sup>17</sup> Pada 14 Mei 1991

---

<sup>12</sup> Arsip Proyek Rekreasi Tanjung Bunga (1980-1998). “Walikotamadya Ujung Pandang: Surat nomor 017/Tb/1980 tanggal 7 Oktober 1980 tentang permohonan memanfaatkan lokasi Tanjung Bunga.” (Makassar : Dinas Arsip Kota Makassar).

<sup>13</sup> Arsip Proyek Rekreasi Tanjung Bunga (1980-1998). “Proposal Kegiatan Inventarisasi Kawasan Rekreasi Tanjung Bunga dan Anggaran Biaya Pelaksanaannya.” (Makassar : Dinas Kearsipan Kota Makassar).

<sup>14</sup> Arsip Proyek Rekreasi Tanjung Bunga (1980-1998). “Walikotamadya Ujung Pandang: Surat nomor 231/DN/XII/1983 tanggal 7 Desember 1983 tentang permohonan izin lokasi proyek pengembangan wilayah pantai Ujung Pandang.” (Makassar : Dinas Arsip Kota Makassar).

<sup>15</sup> *Site plan* adalah dokumen atau gambar yang menunjukkan tata letak dan perencanaan suatu area tertentu, seperti proyek pembangunan, taman, atau pemukiman.

<sup>16</sup> Arsip Proyek Rekreasi Tanjung Bunga (1980-1998). “Surat nomor IV/C tanggal 22 Februari 1984 tentang surat rekomendasi kegiatan.” (Makassar : Dinas Arsip Kota Makassar).

*Gowa Makassar Tourism Development Corporation* (GMTDC) adalah perusahaan yang bertujuan untuk mengembangkan sektor pariwisata dan tur di kawasan Gowa dan Makassar, Sulawesi Selatan. Didirikan pada



dilakukan kerja sama dalam rangka pengolahan perseroan terbatas *Gowa Makassar Tourism Development Corporation* (GMTDC). Masing-masing yaitu, A. Amiruddin (Gubernur Sulawesi Selatan), Soewahyo (WKDH), A. Asis Umar (Bupati Gowa), H. Tenri Abeng (Dirut PT. GMTDC). Dan Drs. H. Yakile (Proyek Officer Pembangunan Sulawesi Selatan di Jakarta).<sup>18</sup>

Kawasan Tanjung Bunga yang terletak 5 km selatan Kota Ujung Pandang, akan menjadi kota penunjang baru. Kawasan seluas 1.000 hektar yang mencakup sebagian kabupaten Gowa ini dirancang konsultan kenamaan Amerika, Walter Releigh Steward. Di Indonesia, Walter Releigh Steward dikenal sebagai perancang Lippo Cikarang, Lippo Karawaci dan Bukit Sentul.<sup>19</sup>

Pada tahun 1997, pembangunan kawasan Tanjung Bunga perbatasan Gowa-Ujungpandang mulai menunjukkan bahwa area tersebut akan menjadi kawasan bisnis yang baru. Salah satu pembangunan fisik yaitu dengan melakukan pembangunan jalan Metro Tanjung Bunga di Kota Makassar pada sekitar tahun 1997, namun baru dapat dimanfaatkan pada tahun 2002.<sup>20</sup>

Pembangunan jalan ini dimaksudkan agar dapat mengurangi beban jalan poros Sultan Alauddin yang sangat padat menuju Kabupaten Takalar dan untuk

---

tahun 1991, GMTDC fokus pada pengembangan kawasan perumahan, pariwisata, dan fasilitas publik di area Tanjung Bunga dan sekitarnya.

<sup>18</sup> Arsip Proyek Rekreasi Kawasan Tanjung Bunga (1980-1999). “Surat Keputusan Walikotamadya Ujungpandang : Surat Nomor 37/S.Kep/590/05/91 tanggal 30 April 1991.” (Makassar : Dinas Kearsipan Kota Makassar.)

Boy, “*Tanjungbunga dan Kebanggaan Ujungpandang*”. KOMPAS, Oktober 1997.

Feri Daud Biang, *Dampak Pembangunan Jalan Metro Tanjung Bunga Komunitas Nelayan di Kota Makassar* (Semarang : Universitas Pro, 2008), 11.



mempersatukan rencana jalan "Outer Ring-Road, Inner Ring-Road dan Middle Ring-Road"<sup>21</sup> menjadi satu jaringan tertutup infrastruktur pembentukan wilayah Mamminasata yang merupakan program pemerintah Sulawesi Selatan untuk menghubungkan secara regional pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota Sungguminasa, Makassar, Maros dan Takalar (Bappeda, 2003), yang membelah bagian Selatan Pantai Losari dari Jalan Penghibur sampai ke Kabupaten Takalar.<sup>22</sup>

Kini PT. Gowa Makassar *Tourism Development Corporation* (GMTDC) Tbk telah membangun kurang lebih 80 produk sejak didirikan tahun 1991.<sup>23</sup> Kawasan Tanjung Bunga kini menjadi kawasan kota masa depan. Kota masa depan memiliki makna sebuah konsep kota berkelanjutan dan *sustainable development*.<sup>24</sup>

Seperti yang tercantum dalam Perda Kota Makassar No. 6 Tahun 2006 tentang RTRW Kota Makassar Tahun 2005-2015, kawasan Tanjung Bunga merupakan kelanjutan pembangunan Kota Baru sesuai dengan *masterplan* yang telah disahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan penetapan komposisi yang seimbang antara kawasan bisnis, wisata, dan permukiman.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Jaringan jalan di perkotaan. Ketiga jaringan jalan ini bekerja sama untuk meningkatkan mobilitas dan efisiensi transportasi di kota, mengurangi kemacetan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

<sup>22</sup> Feri Daud Biang, *Dampak Pembangunan Jalan*, 11.

<sup>23</sup> Adi Mirsan. (2014). "Fokus ke Aspek Keberlanjutan, Kawasan Tanjung Bunga jadi Kota mandiri dengan beragam fasilitas". Diakses pada 21 Oktober 2024, <https://fajar.co.id/2023/07/06/fokus-ke-aspek-keberlanjutan-kawasan-tanjung-bunga-jadi-kota-mandiri-dengan-beragam-fasilitas/> .

<sup>24</sup> Pembangunan berkelanjutan adalah cara untuk berkembang yang memenuhi kebutuhan kita sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yg. Intinya, pembangunan berkelanjutan berusaha untuk menciptakan ngan antara kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan an.

Feri Daud Biang, *Dampak Pembangunan Jalan Metro*, 12.



Perkembangan Kawasan Tanjung Bunga di Makassar mencerminkan dinamika transformasi kota yang pesat, dari area terisolasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Sejak perubahan nama dari Makassar menjadi Ujung Pandang dan kembali lagi, kota ini menunjukkan komitmen untuk beradaptasi dengan perubahan demografi dan kebutuhan masyarakat. Dengan berbagai proyek pembangunan yang melibatkan infrastruktur modern dan pemanfaatan lahan yang strategis, Kawasan Tanjung Bunga telah dirancang sebagai kawasan hunian kelas satu dan area rekreasi yang layak.

Inisiatif yang diambil oleh Gowa Makassar Tourism Development Corporation (GMTDC) serta kolaborasi antara pemerintah dan swasta menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Keberadaan Tanjung Bunga sebagai bagian dari *masterplan* Kota Makassar yang berkelanjutan tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Dengan demikian, Kawasan Tanjung Bunga memiliki potensi besar untuk menjadi model bagi pengembangan kawasan urban yang seimbang, memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berdasarkan latar belakang ini maka penelitian ini ingin mengkaji tentang **“Perkembangan Kawasan Tanjung Bunga tahun 1980-2000-an.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengembangan kawasan Tanjung Bunga?



Mengapa terjadi pengembangan kawasan Tanjung Bunga?

Apakah pihak yang berperan dalam pengembangan ini?

### 1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang perkembangan kawasan Tanjung Bunga pada rentang waktu tahun 1980 hingga 2000-an. Dalam melakukan penelitian sejarah, penting untuk menetapkan batasan permasalahan agar fokus penelitian menjadi lebih jelas. Oleh karena itu, penulis menetapkan dua jenis batasan dalam penelitian ini, yaitu batasan temporal dan batasan spasial.

Batasan temporal dalam penelitian ini dimulai pada tahun 1980, karena pada tahun tersebut mulai dirancang rencana pembangunan kawasan Tanjung Bunga. Rentang waktu ini berakhir pada tahun 2000-an, karena pada periode tersebut perkembangan kawasan Tanjung Bunga mulai terlihat secara signifikan, baik dari segi infrastruktur maupun aktivitas sosial dan ekonomi.

Sementara itu, batasan spasial dalam penelitian ini difokuskan pada kawasan Tanjung Bunga itu sendiri. Secara administratif, kawasan ini terletak di dua kecamatan yang berada di wilayah Kota Makassar, yaitu sebagian berada di Kecamatan Tamalate dan sebagian lainnya berada di Kecamatan Mariso.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

- a. Mengetahui pihak yang berperan dalam pengembangan kawasan Tanjung Bunga.
- b. Mengetahui alasan pengembangan kawasan Tanjung Bunga.
- c. Mengetahui proses pengembangan kawasan Tanjung Bunga.



### Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
- b. Sebagai literatur untuk menambah referensi tentang sejarah perkotaannya khususnya Kawasan Tanjung Bunga.
- c. Untuk menambah pengetahuan tentang Kawasan Tanjung Bunga.

## 1. 6 Tinjauan Pustaka

### 1.1.1 Penelitian Yang Relevan

Dalam penulisan penelitian ini mengacu pada dua jenis sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan bukti atau informasi yang dibuat pada saat peristiwa sejarah berlangsung atau tidak lama setelahnya. Adapun sumber sekunder merupakan bukti atau informasi yang dibuat berdasarkan sumber primer ini diolah dan diinterpretasikan oleh orang lain.<sup>26</sup> Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dianggap berkaitan dengan tema penulis:

Salah satu tulisan yang memberikan kerangka pemahaman mengenai perkembangan kota di Indonesia adalah tulisan Purnawan Basundoro yang berjudul *Pengantar Sejarah Kota*. Tulisan ini membahas secara mendalam tentang sejarah, dinamika sosial, budaya, serta tantangan yang dihadapi kota-kota di Indonesia. Penulis menyoroti peran migrasi, perubahan ekonomi, serta kebijakan pemerintah dalam membentuk wajah kota modern. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman atas dinamika tersebut menjadi penting untuk melihat bagaimana proses urbanisasi



---

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Benteng Budaya,

dan intervensi kebijakan turut membentuk kawasan Tanjung Bunga sebagai bagian dari perluasan ruang kota Makassar.

Tulisan *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* yang disunting oleh Koentjaraningrat merupakan karya klasik dalam studi kebudayaan Indonesia. Tulisan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsep dasar kebudayaan, corak budaya lokal, dan perannya dalam pembangunan. Dalam kaitannya dengan perkembangan kawasan Tanjung Bunga, pemahaman atas budaya lokal menjadi penting karena pembangunan kawasan ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika masyarakat pesisir yang telah lama bermukim di wilayah tersebut.

Tulisan Bambang Triatmodjo yang berjudul *Perencanaan Bangunan Pantai* membahas prinsip-prinsip pembangunan di wilayah pesisir. Dalam penelitian ini, tulisan ini relevan karena Tanjung Bunga merupakan kawasan pesisir yang mengalami pembangunan masif, termasuk reklamasi. Pemahaman terhadap pertimbangan teknis dan lingkungan dalam tulisan ini membantu menjelaskan bagaimana kawasan ini dibentuk secara fisik.

Tulisan *Makassar Nol Kilometer* yang diterbitkan oleh Tanah Indie Press mengangkat realitas sosial Kota Makassar secara kritis. Salah satu bagian tulisan ini menyinggung keberadaan kota satelit Tanjung Bunga sebagai hasil dari modernisasi dan perluasan kota. Hal ini memperkaya sudut pandang penelitian dalam memahami posisi Tanjung Bunga dalam struktur kota Makassar.<sup>27</sup>



---

Anwar J. Rachman *et. al.*, *Makassar Nol Kilometer* (Makassar : Tanah ss, 2014), 248.

Tulisan Batara Surya yang berjudul *Perubahan Fisik Spasial Kawasan Pinggiran Memarginalkan Komunitas Lokal* menyoroti keterlibatan pemerintah dan swasta dalam penguasaan lahan di kawasan Metro Tanjung Bunga. Tulisan ini relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan adanya pergeseran ruang yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berdampak sosial terhadap komunitas lokal di kawasan tersebut.<sup>28</sup>

Tulisan Nasrulla yang berjudul *Analisis Pemanfaatan Ruang Perkotaan Kawasan Tanjung Bunga* mengkaji secara spesifik perkembangan penggunaan lahan di Tanjung Bunga. Tulisan ini memperlihatkan bahwa perubahan tata ruang di kawasan ini berlangsung seiring dengan arah kebijakan pembangunan kota, yang juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Tulisan Feri Daud Biang yang berjudul *Dampak Pembangunan Jalan Metro Tanjung Bunga terhadap Komunitas Nelayan di Kota Makassar* membahas pembangunan jalan Metro Tanjung Bunga yang menjadi infrastruktur utama kawasan tersebut sejak tahun 1997.<sup>29</sup> Pembangunan ini menjadi titik penting dalam sejarah perkembangan kawasan, karena menjadi awal integrasi kawasan Tanjung Bunga dalam jaringan transportasi metropolitan Mamminasata.

Tulisan Ilham Daeng Makkelo yang berjudul *Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Makassar pada Abad ke-20* memberikan latar belakang penting

---

<sup>28</sup> Batara Surya, "Perubahan Fisik Spasial Kawasan Pinggiran nalkan Komunitas Lokal (Kausu Kota Baru Metro Tanjung Bunga, )." *Jurnal Bumi Lestari* 10, no. 2 (2010): 226-235.

Feri Daud Biang, *Dampak Pembangunan Jalan Metro Tanjung Bunga Komunitas Nelayan di Kota Makassar* (Tesis Magister Perencanaan dan Kota, Universitas Hasanuddin, 2006), 11.



dalam memahami proses modernisasi Kota Makassar. Kemunculan kawasan baru seperti Tanjung Bunga merupakan bagian dari upaya menjadikan Makassar sebagai kota modern dengan infrastruktur dan tata ruang baru.<sup>30</sup>

Tulisan Nasrullah, Slamet Trisutomo, dan Abdul Rachman Rasyid yang berjudul *Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Kawasan Tanjung Bunga* menyajikan data konkret mengenai perubahan penggunaan lahan dari tahun ke tahun. Tulisan ini memberikan kontribusi data yang berguna dalam menelusuri bagaimana transformasi kawasan Tanjung Bunga berlangsung sejak era 1980-an hingga 2000-an.

Tulisan Dias Pradadimara yang berjudul *Dari Makassar ke Makassar: Aspek Demografi dan Politik Proses "Etnisasi" Sebuah Kota* membahas pentingnya identitas etnis dalam dinamika sosial perkotaan. Dalam konteks perkembangan Tanjung Bunga, tulisan ini berguna untuk memahami perubahan sosial yang terjadi, termasuk pergeseran identitas dan posisi masyarakat lokal akibat masuknya kepentingan-kepentingan baru dalam ruang kota.

Tulisan Nur Halisa yang berjudul *Pemanfaatan Kawasan Pantai Losari Tahun 1975–1990-an* mengkaji pemanfaatan ruang publik pesisir Kota Makassar dalam konteks sosial, ekonomi, dan wisata. Meskipun fokusnya bukan pada Tanjung Bunga, tulisan ini relevan sebagai pembanding karena sama-sama membahas kawasan pesisir yang mengalami perkembangan signifikan akibat intervensi



---

Ilham Daeng Makkelo, "Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota pada Abad ke-20," *Jurnal Sejarah* 1, no. 2 (2018): 54-61.

kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Pantai Losari dan Tanjung Bunga sama-sama mencerminkan bagaimana ruang kota pesisir dijadikan pusat keramaian baru dalam proses modernisasi perkotaan.

Dari berbagai tulisan di atas, belum ada yang secara khusus membahas tentang proses perkembangan kawasan Tanjung Bunga dari dekade 1980-an hingga 2000-an secara historis. Penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan tersebut dengan menelusuri perubahan fisik, sosial, dan ekonomi kawasan Tanjung Bunga dalam rentang waktu yang ditentukan.

### 1.1.2 Landasan Konseptual

Dalam menelaah perkembangan kawasan Tanjung Bunga, diperlukan pemahaman terhadap sejumlah konsep dasar seperti pengembangan, kawasan, ruang, dan tata ruang. Keempat konsep ini menjadi kunci untuk memahami arah perubahan yang terjadi dalam konteks kawasan pesisir kota Makassar pada akhir abad ke-20.

Pengembangan merupakan suatu proses atau upaya untuk meningkatkan kualitas dan fungsi dari sesuatu yang telah ada menjadi lebih baik atau lebih maju. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pengembangan adalah proses, cara, atau perbuatan mengembangkan.<sup>31</sup> Dalam konteks wilayah, pengembangan dapat terjadi di berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, hingga budaya. Konsep ini relevan dalam melihat bagaimana kawasan Tanjung Bunga mengalami transformasi dari wilayah pesisir dengan fungsi tradisional menjadi ruang kota yang modern dan kompleks.



---

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi V (Jakarta : Badan Pengembangan Bahasa, Kemendikbud, 2016), 725.

Kawasan, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diartikan sebagai daerah sekitar atau lingkungan yang memiliki sifat-sifat tertentu.<sup>32</sup> Dalam studi perkotaan, kawasan merujuk pada bagian dari wilayah kota yang memiliki karakteristik spesifik baik secara fisik, sosial, maupun fungsional. Kawasan Tanjung Bunga merupakan salah satu bagian penting dari wilayah selatan Kota Makassar yang mengalami perubahan signifikan sejak 1980-an, seiring dengan kebijakan pemerintah daerah dan keterlibatan pihak swasta dalam pengembangannya.

Nama “Metro Tanjung Bunga” bukanlah nama administratif, melainkan merupakan hasil strategi branding dan perencanaan kawasan modern oleh PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD). Istilah "Metro" diadopsi dari kata “metropolitan” untuk menciptakan citra kawasan terpadu yang mencakup perumahan elit, fasilitas komersial, pusat hiburan, dan infrastruktur masa depan. Kawasan ini dikembangkan sejak tahun 1997 dan secara konseptual diarahkan sebagai "kota dalam kota" yang modern dan terintegrasi, selaras dengan visi GMTD sebagai pengembang utama kawasan Tanjung Bunga dengan area pengembangan lebih dari 1.000 hektar.<sup>33</sup>

Ruang dipahami sebagai wadah yang meliputi daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat berlangsungnya aktivitas manusia dan makhluk

---

<sup>32</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi V (Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud, 2016), 712.

<sup>33</sup> PT GMTD Tbk, *Laporan Tahunan 2005*, hlm. 6; Gowa Makassar Tourism Development, “Tentang Kami,” diakses 30 Juli 2025, <https://www.gmtd.co.id>.



hidup lainnya.<sup>34</sup> Dalam konteks pembangunan, ruang tidak hanya dilihat sebagai latar fisik, tetapi juga sebagai aset yang memiliki nilai strategis dan ekonomi. Terkait hal ini, tata ruang adalah wujud struktural dari pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak.<sup>35</sup> Perencanaan tata ruang memberikan arahan bagi pemanfaatan ruang secara optimal dan berkelanjutan. Pengembangan kawasan seperti Tanjung Bunga tidak dapat dilepaskan dari peran perencanaan tata ruang kota Makassar, yang sejak dekade 1980-an mulai mengarahkan wilayah pesisir selatan untuk dijadikan kawasan penyangga sekaligus pengembangan baru.

Pengembangan kawasan sendiri merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan potensi suatu wilayah melalui pemanfaatan sumber daya yang ada—baik sumber daya alam, manusia, budaya, maupun infrastruktur.<sup>36</sup> Proses ini melibatkan berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang saling terkait dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam kasus Tanjung Bunga, pengembangan kawasan tidak hanya mencakup perubahan fisik seperti pembangunan jalan, pusat perbelanjaan, dan perumahan mewah, tetapi juga mencerminkan perubahan orientasi ruang kota dari kawasan tradisional ke arah modernitas.

Tanjung Bunga sebagai kawasan pesisir memiliki daya tarik visual dan posisi strategis yang kemudian mendorong investor dan pemerintah daerah untuk



---

<sup>34</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi V (Jakarta : Badan Pengembangan Peningkatan Bahasa, Kemendikbud, 2016), 1280.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi V (Jakarta : Badan Pengembangan Peningkatan Bahasa, Kemendikbud, 2016), 1281.

J. B. Djaja, *Pengembangan Wilayah : Konsep dan Pendekatan* (Jakarta: Pustaka University Press, 2010), 22.

mengembangkannya sebagai kawasan pariwisata dan permukiman elit. Perubahan tersebut membawa serta dampak sosial-ekonomi yang kompleks, termasuk perubahan fungsi lahan, perpindahan penduduk lokal, serta transformasi pola hidup masyarakat. Kehadiran bangunan modern seperti hotel berbintang, mall, rumah sakit, dan perkantoran mencerminkan wajah baru kawasan tersebut sebagai bagian dari simbol kota modern.<sup>37</sup>

Dengan memahami konsep-konsep di atas, penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengembangan kawasan Tanjung Bunga berlangsung dan memengaruhi tata ruang serta kehidupan sosial masyarakat sekitar dalam kurun waktu tahun 1980 hingga 2000-an.

### 1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan merekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lalu berdasarkan sumber-sumber yang tersedia secara sistematis dan ilmiah. Metode ini sangat relevan karena penelitian ini membahas perubahan yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu, yaitu perkembangan kawasan Tanjung Bunga dari tahun 1980 hingga 2000-an. Metodologi sejarah adalah seperangkat petunjuk teknis yang mencakup tahapan pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi).<sup>38</sup> Setiap tahapan ini dijalankan



---

Ilham Daeng Makkelo, "Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota pada Abad ke-20," *Jurnal Sejarah* 1, no. 2 (2018): 53.  
Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang, 2003), 89.

secara berurutan untuk menjamin validitas dan objektivitas dalam rekonstruksi sejarah.

Metode sejarah tidak hanya mencatat fakta, tetapi juga berupaya memahami bagaimana dan mengapa peristiwa terjadi, serta menempatkan setiap fakta dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik zamannya.<sup>39</sup> Pendekatan ini memungkinkan penelitian sejarah menghasilkan narasi yang lebih bermakna dan relevan.

#### 1. Heuristik atau Pengumpulan Sumber

Heuristik merupakan tahap awal dalam penelitian sejarah yang berkaitan dengan usaha mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber yang digunakan terdiri atas dua jenis, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup dokumen asli, arsip pemerintahan, surat kabar lama, peta, foto, dan hasil wawancara langsung. Sumber-sumber ini diperoleh dari beberapa institusi penting seperti di perpustakaan Universitas Hasanuddin yang beralamat di Kampus Universitas Hasanuddin JL. Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar, Sulawesi Selatan. Perpustakaan Abdurrasyid Deang Lurang, Jl. Kenanga 1, Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Perpustakaan dan Arsip Sulawesi Selatan yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 12 No. 146, Tamalanrea, Kota Makassar. Badan Perpustakaan dan arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Jl. Sultan Alauddin No. 7, Mangasa. Kec. Tamalate, kota Makassar,



---

John Tosh, *The Pursuit of History* (London: Routledge, 2015), 90.

Sulawesi Selatan. Dinas Kearsipan Kota Makassar yang terletak di Jl. Ahmad Yani, No.2, Baru, Kecamatan. Ujung Pandang, Kota Makassar.

Penulis juga melakukan observasi langsung ke kawasan Tanjung Bunga untuk melihat perubahan fisik ruang kota yang terjadi dari waktu ke waktu. Selain itu, dilakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan, dan warga setempat yang mengalami langsung proses perubahan kawasan. Sumber sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tulisan ilmiah seperti buku, jurnal, tesis, dan skripsi yang membahas isu-isu terkait pengembangan kawasan, kebijakan kota, modernisasi, dan perubahan tata ruang. Semua sumber tersebut membantu membangun fondasi data yang kuat untuk dianalisis secara historis.

## 2. Verifikasi atau kritik sumber

Setelah sumber terkumpul, dilakukan proses verifikasi atau kritik sumber, yaitu tahap penilaian terhadap keabsahan, keotentikan, dan kredibilitas sumber. Kritik sumber dibagi dua, yakni kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal bertujuan untuk menilai aspek fisik sumber, seperti keaslian dokumen, tanggal terbit, dan kejelasan penulisnya. Sementara kritik internal difokuskan pada isi sumber, seperti konsistensi data, bias penulis, dan relevansi terhadap topik penelitian.<sup>40</sup>

Proses ini penting untuk menyaring sumber-sumber yang layak digunakan dalam penulisan sejarah. Tanpa kritik yang memadai, seorang sejarawan berisiko mereproduksi informasi yang keliru, bias, atau bahkan manipulatif. Sebagaimana



---

Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method*,  
Joko Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1985), 45.

dijelaskan oleh Louis Gottschalk, penilaian kritis terhadap sumber adalah bagian tak terpisahkan dari proses sejarah ilmiah.<sup>41</sup>

Verifikasi ini juga membantu penulis dalam memilih sumber-sumber yang benar-benar representatif dan memiliki bobot historis. Misalnya, beberapa surat kabar lokal pada masa itu mengandung kecenderungan untuk menonjolkan keberhasilan pembangunan tanpa mengungkap dampak sosial yang terjadi. Oleh karena itu, penulis berupaya untuk mengimbangi dengan sumber lisan dan dokumen arsip resmi guna memperoleh gambaran yang lebih seimbang dan objektif.

### 3. Interpretasi

Tahapan selanjutnya adalah interpretasi, yaitu proses menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi untuk memahami makna di balik peristiwa yang terjadi.<sup>42</sup> Interpretasi memungkinkan seorang peneliti mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, serta menjawab pertanyaan mendalam seperti “mengapa” dan “bagaimana” suatu perubahan berlangsung.

Dalam konteks penelitian ini, interpretasi diarahkan untuk memahami proses perkembangan kawasan Tanjung Bunga dalam aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan pembangunan. Penulis menafsirkan bahwa kawasan ini tidak berkembang secara alami, melainkan merupakan hasil dari strategi pembangunan terencana yang melibatkan kepentingan pemerintah dan swasta. Selain itu, interpretasi juga mencermati dampak pembangunan terhadap masyarakat lokal, seperti relokasi, perubahan pola permukiman, dan transformasi gaya hidup.



---

Gottschalk, *Understanding History*, 46.

Gottschalk, *Understanding History*, 48.

Interpretasi dalam sejarah bukan sekadar menyampaikan fakta, tetapi menyusun pemahaman tentang keterkaitan antara struktur sosial dan dinamika kekuasaan yang membentuk sejarah.<sup>43</sup>

#### 4. Historiografi atau Penulisan Sejarah

Tahap akhir dalam metode sejarah adalah historiografi, yaitu proses penyusunan narasi sejarah berdasarkan hasil interpretasi terhadap sumber yang telah dikaji.<sup>44</sup> Dalam penulisan ini, historiografi berfungsi sebagai media untuk menyampaikan proses perkembangan kawasan Tanjung Bunga secara sistematis, kronologis, dan argumentatif.

Penulis menyusun narasi berdasarkan kronologi perubahan kawasan Tanjung Bunga dari wilayah pesisir dengan fungsi tradisional menjadi kawasan kota modern yang dipenuhi bangunan komersial, permukiman elite, dan pusat perbelanjaan. Penulisan dilakukan secara tematik dan kronologis, serta mengacu pada prinsip objektivitas dan kejujuran ilmiah.

Penulisan sejarah tidak boleh hanya menjadi laporan deskriptif, tetapi harus menjadi refleksi kritis terhadap dinamika masyarakat yang membentuk sejarah itu sendiri.<sup>45</sup> Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mencatat perkembangan fisik kawasan, tetapi juga melihat dampaknya terhadap masyarakat dan struktur ruang kota Makassar secara keseluruhan.



Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Gramedia, 1993), 33.

Gottschalk, *Understanding History*, 50.

Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Nusantara* (Yayasan Obor Indonesia, 1985), 21.

## 1. 8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab utama yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap bab disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan menggambarkan secara kronologis perkembangan kawasan Tanjung Bunga pada kurun waktu 1980 hingga 2000-an. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

**BAB I**, Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar konseptual bagi keseluruhan isi skripsi.

**BAB II**, Bab ini membahas kondisi umum Kota Makassar dalam rentang waktu yang dikaji, baik dari segi geografis, administratif, maupun perkembangan kota secara umum. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan konteks awal sebelum mengulas lebih jauh perkembangan kawasan Tanjung Bunga.

**BAB III**, pada BAB ini penulis akan membahas gambaran umum Kawasan Tanjung Bunga, kondisi geografis, proses reklamasi, manfaat dan tujuan reklamasi serta pro kontra yang terjadi di Kawasan Tanjung Bunga pada periode yang dibahas dalam tulisan ini.

**BAB IV**, pada BAB ini penulis akan membahas perubahan pola ruang dan tata guna lahan di kawasan Tanjung Bunga.

**BAB V**, pada BAB ini berisi penjabaran dari BAB I sampai BAB V yang kemudian

buah kesimpulan dari seluruh pembahasan. Kesimpulan tersebut merupakan



jawaban dari berbagai rumusan permasalahan yang telah diajukan sekaligus menjadi penutup penelitian ini.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KOTA MAKASSAR

#### 2.1 Kondisi Geografi

Kota Makassar, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu kota penting di Indonesia yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Dengan kondisi topografi yang bervariasi mulai dari dataran rendah hingga perbukitan, serta letaknya yang menghadap langsung ke Selat Makassar, kota ini memiliki potensi besar dalam sektor perdagangan, pariwisata, dan pembangunan ekonomi wilayah Indonesia Timur.<sup>46</sup> Dengan iklim tropis, adanya perbukitan, dan akses langsung ke Laut Sulawesi, Makassar menjadi kota yang kaya akan potensi alami yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.<sup>47</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 1964 (Lembar Negara Tahun 1964 No. 94 Pasal 2 ayat 3), Makassar ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 1965 dalam kedudukannya sebagai Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar berubah nama menjadi Kotamadya Ujung Pandang berdasarkan peraturan Pemerintahan No.51 Tahun 1971.<sup>48</sup>

Jika kita memperhatikan peta kepulauan Indonesia, maka di Pantai barat jazirah Selatan Pulau Sulawesi terdapat kota Makassar pada koordinat 119° 24'17,



<sup>46</sup> Pemerintah Kota Makassar, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar* 34 (Makassar: Bappeda Kota Makassar, 2015), 12.

Badan Pusat Statistik Kota Makassar, *Kota Makassar dalam Angka 2023* (Makassar: BPS, 2023), 8.

Zainuddin Tika *et.al*, "*Makassar Tempo Doeloe*". (Makassar: Lembaga Penelitian Sejarah Budaya Sulawesi Selatan, 2011): 19-20.

38” bujur timur dan 5° 8’6,19” lintang selatan. Justru itu kota bahari ini beriklim tropis dengan suhu rata-rata 22°- 32° C dan mengenal dua musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung bulan Oktober hingga April pada waktu awal tahun. Musim kemarau berlangsung antara bulan Mei hingga September. Curah hujan pada umumnya tinggi, yaitu 2000-3000 mm pertahun dengan hari-hari hujan rata-rata 108 hari pertahun. Arah angin 210 ° 15’ bujur timur atau arah selatan daya dengan kecepatan angin rata-rata 5,1 km dan kelembaban antara 73%-86%.<sup>49</sup>

Selain kondisi iklim dan geografisnya yang unik, Kota Makassar juga memiliki sejarah perkembangan wilayah yang menarik. Perubahan batas administratif dan perluasan wilayahnya pada tahun 1971 menandai transformasi kota ini dari sebuah kota kecil menjadi pusat urban yang lebih besar dan modern.<sup>50</sup> Perkembangan ini tidak hanya memengaruhi luas wilayah dan jumlah penduduk, tetapi juga memperkuat peran Makassar sebagai kota strategis di kawasan timur Indonesia, baik dari segi ekonomi, budaya, maupun sosial.<sup>51</sup>

Kota Makassar berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa di sebelah selatan, Kabupaten Maros di sebelah timur, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

---

<sup>49</sup> Anwar Arifin, “*Pergulatan Politik di Makassar 1945-1966*”. (Tangerang Selatan: Pustaka Irvan, 2019), 31-32.

<sup>50</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Kepulauan dalam Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan*, Pasal II. Asmunandar & Bahri, “The History of Makassar City: Physical and rative Development,” *Proceedings of the 3rd International Conference on iences (ICSS 2020)*, 598–602.



(Pangkep) di sebelah utara, serta Selat Makassar di sebelah barat.<sup>52</sup> Di samping itu, kawasan perkotaan ini diapit oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Tallo di utara dan Sungai Jeneberang di selatan, yang secara hidrologis penting bagi ekosistem pesisir dan sistem drainase kota.<sup>53</sup>

Pada tahun 1967 Sulawesi Selatan dimekarkan menjadi 21 Kabupaten dan dua Kotamadya, dengan luas wilayah seluruhnya sekitar 100.500 km<sup>2</sup>.<sup>54</sup> Kemudian di tahun 1971 muncul gagasan para petinggi di Makassar untuk melebarkan wilayah kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kolonel Inf. H.M. Daeng Patompo, selaku walikota Makassar berusaha untuk mendekati 3 (tiga) orang Bupati tetangga Makassar. Ketiga nama tersebut bernama: Kolonel Inf. H. Mas'ud selaku bupati dari Gowa, Kolonel Inf. Kasim DM Bupati dari Maros dan Kolonel Inf. H.M. Arsyad B. selaku bupati dari Kab. Pangkep. Akan tetapi ketiga Bupati ini tidak memberi respon positif terhadap gagasan H.M. Daeng Patompo untuk mengambil sebagian wilayah ketiga Kabupaten, guna melebarkan wilayah Makassar.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Pemerintah Kota Makassar, *Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar* (Makassar: Portal Resmi Pemkot Makassar, tautan daring 2025), bagian "Peta Wilayah Administrasi".

<sup>53</sup> S. Baja, U. Nurmiaty, dan S. Arif, "GIS-based Soil Erosion Modeling for Assessing Land Suitability in the Urban Watershed of Tallo River, South Sulawesi, Indonesia," *Modern Applied Science* 12, no. 5 (2020): 47; serta *Kajian Sosiologis tentang Masalah Lingkungan Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang di Kota Makassar*, *Jurnal Planomadani* (2019): 112.

<sup>54</sup> Anwar Arifin, *Pergulatan Politik*, 32.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Sulawesi Selatan*, Pasal II-III, diundangkan 1 September 1971.



Pada tahun 1971 kembali mengalami perluasan wilayah, pada tanggal 1 September 1971 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tentang “Perubahan Batas - Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”, memutuskan Daerah Kotamadya Makassar diperluas dengan memasukkan sebagian daerah, Adapun beberapa daerah sebagai berikut:

1. Kabupaten Gowa yang meliputi desa: Panaikang, Barombong, Karuwisi, Tello Baru, Antang, Tamangappa, Jongaya, Rappocini, Maccini Sombala dan Mangasa.
2. Kabupaten Maros yang meliputi desa: Daya, Bira, Sudiang, Tamalanrea dan Bulurokeng.
3. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi desa: Barang Caddi, Barang Lompo, dan Perjuangan/Kodingareng.<sup>56</sup>

Sampai tahun 1971, Kota Makassar meliputi wilayah seluas 21 km<sup>2</sup> dengan penduduk sekitar 432.000 jiwa, yang tersebar pada delapan kecamatan (distrik). Mulai tahun 1971 (PP. No. 51/1971), kota ini diperluas menjadi 175 km<sup>2</sup> dengan tambahan 3 kecamatan sehingga memiliki penduduk sebanyak 434.766 jiwa. Nama kota pun berganti menjadi Ujung Pandang.<sup>57</sup>

Makassar mendapat perhatian khusus tatkala nama itu harus berganti dengan nama Ujung Pandang (1 September 1971). Nama *Makassar* berubah menjadi *Ujung*



---

Akhmad Akbar Abdullah, *et.al*, “Perpindahan Karena Perluasan: a Mangasa dalam Wilayah Kota Makassar 1971”. *Jurnal Patingaloang* v. 4, (2018): 15.

Anwar Arifin, *Pergulatan Politik*, 31-32.

*Pandang* berdasarkan peraturan pemerintah No. 51/1971, karena kota itu diperluas dari 21 km<sup>2</sup> menjadi 115,87 km<sup>2</sup>. Demikian juga jumlah penduduk bertambah dari 450.000 jiwa menjadi 650.000 Jiwa. Wilayah administratif (kecamatan) bertambah pula dari delapan menjadi sebelas kecamatan. Kemudian nama *Ujung Pandang* berubah lagi menjadi *Makassar* tahun 1999.<sup>58</sup> Nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar dan sesuai dengan Undang-undang Pemerintah Daerah Luas wilayah pun bertambah kurang lebih 4 mil ke arah laut 10.000 Ha menjadi 175.77 km.<sup>59</sup>

Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi geografis Kota Makassar, ialah topografi serta bentang alam di wilayah tersebut. Secara umum Kota Makassar memiliki topografi dataran rendah, dengan struktur tanah yang sangat bervariasi. Selain itu Kota Makassar juga memiliki beberapa daerah resapan air, rawa, serta beberapa sungai yang sangat penting fungsinya bagi kehidupan masyarakat Kota Makassar. Beberapa daerah rawa, serta daerah sekitar pesisir pantai Kota Makassar masih banyak ditumbuhi oleh vegetasi mangrove, nipah dan lain-lain. Selain rawa, sungai-sungai utama yang mengalir melintasi Kota Makassar serta sangat penting peranannya dan memiliki nilai sejarah bagi perkembangan Kota Makassar yaitu: Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo.<sup>60</sup>



---

<sup>58</sup> Anwar Arifin, *Pergulatan Politik*, 19.

*Citra Kota Makassar Dalam Arsip*. (Jakarta: arsip Nasional Republik Indonesia, 2017): 12.

Alberth Fernando T, “*Bangunan-Bangunan Gereja Pada Masa Kolonial Makassar*”, (Makassar: Skripsi Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 2013): 59.

## 2.2 Kondisi Penduduk

Perkembangan suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor alamiah, tetapi juga oleh dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah. Aspek-aspek seperti kebijakan pemerintahan, ketersediaan sumber daya alam, serta kemajuan teknologi turut menentukan arah pertumbuhan sebuah daerah.<sup>61</sup> Dalam konteks ini, jumlah penduduk menjadi salah satu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari proses perkembangan wilayah, karena adanya hubungan erat antara komposisi demografis dengan kapasitas wilayah untuk berkembang.<sup>62</sup>

Pada tahun 1905 jumlah penduduk kota Makassar berjumlah sekitar 26.000 orang, dan tentunya mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 1930 menurut data sensus penduduk, jumlah penduduk Makassar berjumlah sekitar 84.000 orang.<sup>63</sup>

Pada tahun 1950, Afdeling Makassar terdapat 144.979 penduduk. Dari jumlah tersebut sekitar 44.079 jiwa tinggal dalam distrik Makassar, 28.695 jiwa tinggal dalam distrik Wajo, Mariso 21.375 jiwa, Ujung Tanah 14.688 jiwa, Spermondes 26.760 jiwa, Kalukuang 4.655 Jiwa, dan 4.543 di Pastilon. Dalam distrik Makassar sendiri menjelang dan dalam kekuasaan NIT memiliki Sembilan kampung, yaitu kampung baru dengan jumlah penduduk 3.319, Mangkura 3.799, Pisang S. 7.326 penduduk, Pisang O. 5.561 penduduk, L. Bangi 5.360, Mardekaya 6.542, Maricaya

---

<sup>61</sup> R. Bintarto, *Interaksi Desa dan Kota serta Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 25.

Daldjoeni, *Geografi Kota dan Desa* (Bandung: Alumni, 1987), 61.

Dias Pradadimara, "Dari Makassar ke Makassar: Proses Etnisasi Sebuah dalam Dias Pradadimara, Musimin A.R Effendy (Penyunting). *Kontinuitas Perubahan Dalam Sejarah Sulawesi-Selatan*. (Yogyakarta: Ombak, 2004):



7.625 penduduk, Bara-baraya 2.068 penduduk, dan Maccini 2.479 penduduk. Demikian kampung Pisang dan Kampung Maricaya merupakan kampung yang terpadat penduduknya di distrik Makassar pada masa itu.<sup>64</sup>

Dalam laporan Walikota H. M Daeng Patompo (1966-1978) tahun 1976 tertulis bahwa penduduk Kota Makassar tahun 1966 adalah 424.143 jiwa dan empat tahun kemudian (1970) bertambah menjadi 432.240 jiwa. Pada tahun 1985 jumlah penduduk Kotamadya Ujung Pandang telah mencapai 778.593 jiwa, sesuai informasi dan kantor statistik.<sup>65</sup> Tingginya laju pertumbuhan ini disebabkan arus tingkat urbanisasi yang relatif masih tinggi.

Perkembangan penduduk Kota Makassar mulai tahun 1947 hingga pada tahun 1966 meningkat akibat dari urbanisasi.<sup>66</sup> Peningkatan penduduk Kota Makassar setiap tahun semakin signifikan, hasil sensus pada tahun 1995 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Makassar mencapai 1.077.455 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 3,5% per tahun sedangkan rata-rata kepadatan penduduk 6.129/km.<sup>67</sup>

Laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar di masa Orde Baru berada jauh di atas laju pertumbuhan penduduk provinsi. Kalau Provinsi Sulawesi Selatan selalu mengalami laju pertumbuhan yang rendah, sebaliknya Kota Makassar mengalami laju pertumbuhan yang relatif tinggi pada periode yang sama. Di dekade berikutnya,

---

<sup>64</sup> J.R. Chaniago, *Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia Peranan Pemimpin Lokal Dalam Dinamika Politik di Sulawesi Selatan dan Sumatera Timur* (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2002): 75-76.

Anwar Arifin, *Pergulatan Politik*, 33.

Anwar Arifin, *Pergulatan Politik*, 31.

Syahrudin Mansyur, *Konstruksi Baru Pameran Museum Kota* (Tesis. Depok: Universitas Indonesia, 2010): 34.



laju pertumbuhan penduduk kota mencapai 2,9 persen atau lebih dari dua kali laju pertumbuhan penduduk provinsi. Meskipun laju pertumbuhan penduduk kota menurun di dekade 1990-an, angkanya masih lebih tinggi dari angka laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>68</sup>

Terjadinya peningkatan jumlah penduduk di kota-kota besar yang pada umumnya berada di kawasan pantai mengakibatkan tingginya permintaan akan tempat tinggal dan fasilitas lainnya yang menunjang kebutuhan hidup. Peningkatan jumlah penduduk ini diakibatkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah kedatangan para pedagang, pengusaha, dan kaum cendekiawan di kota tersebut, perpindahan penduduk desa ke kota untuk mencari kerja, adanya penduduk desa yang ingin menuntut ilmu dikota dan sebagainya.<sup>69</sup>

Pada awal abad ke-20, Kota Makassar telah banyak terdapat suku dan bangsa lain yang bermukim, seperti Bugis, Makassar, Mandar, Cina, Melayu, Arab, Madura, Jawa, Toraja, India, Banjar, Ambon, Buton, Sangir, Minahasa, Tanimbar. Kedatangan dari berbagai suku dan bangsa tersebut mereka berperan dalam sektor perekonomian. Pada umumnya diantara mereka ada yang bekerja sebagai tukang, buruh, pedagang, pegawai, nelayan, polisi, pelayan took, tukang sepatu, tukang kayu, tukang pangkas rambut, sertai pandai emas (pengrajin khusus mengolah emas). Dengan adanya



Dias Pradadimara, “Dari Makassar ke Makassar: Proses Etnisisasi Sebuah alam Dias Pradadimara dan Muslimin A.R. Effendy, *Kontinuitas dan in dalam Sejarah Sulawesi Selatan*, (Yogyakarta: Ombak, 2004): 88.

Nur Jannah Jamal, “*Perumahan Rakyat Kota Makassar 1927-1974*”.  
ur: Skripsi ilmu sejarah fakultas sastra universitas hasanuddin, 2016): 28.

kehadiran mereka sangat berperan dalam pembentukan identitas di Kota Makassar dan menjadikan Makassar sebagai sebuah Kota yang multietnis.<sup>70</sup>

Jumlah penduduk terbanyak merupakan etnis Bugis dan Makassar yang berasal dari Sulawesi yaitu, Toraja dan Mandar. Suku lain yang berasal dari luar Sulawesi Selatan yakni, Ambon, Timor, Bima, Buton, dan bahkan Cina, dari keragaman suku menciptakan pula keanekaragaman dalam kota semakin tinggi.<sup>71</sup>

Penduduk Makassar memiliki sifat dan karakter yang hampir sama dengan orang Bugis. Ia memiliki sifat-sifat demokratis dan sangat menghargai kekeluargaan, selain itu mereka juga dikenal sebagai orang yang peramah sangat menghargai orang lain serta sangat tinggi rasa keistimewaannya, mereka juga terkenal dengan sifatnya yang keras kepala. selain itu penduduk kota Makassar memiliki bentuk tubuh sedikit langsing, berotot, dan warna kulinya yang sawomatang. Mereka juga memiliki bahasa yang berbeda dengan bahasa orang Bugis, bahasanya adalah vokalis, tidak mempunyai mede klinker.<sup>72</sup>

### 2.3 Kondisi Sosial Ekonomi

Pada tahun 1947-1950 selama periode (NIT), keadaan ekonomi daerah Sulawesi Selatan dapat dikatakan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penataan sistem ekonomi dan perdagangan berbasis komoditi lokal yang mengakibatkan semakin meningkatnya tingkat kehidupan masyarakat di Sulawesi

---

<sup>70</sup> Asmunandar, Re-Identitas Kota Lama Makassar, *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, Vol.15 No. 1, (2020): 9.

Abu Hamid, *et.al*, "Perkampungan di Perkotaan Sebagai Wujud Proses Sosial." (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan 1985): 39-40.

Mattulada, "Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah". (Jakarta : Ombak, 2011): 12.



Selatan. Hal tersebut juga berdampak pada peningkatan produksi beras dan hasil bumi lainnya.<sup>73</sup> Namun, secara umum keadaan ekonomi nasional Indonesia pada masa tersebut justru mengalami ketidakstabilan akibat dampak agresi militer Belanda, inflasi tinggi, dan keterbatasan fiskal di wilayah Republik Indonesia yang belum sepenuhnya berdaulat.<sup>74</sup>

Penduduk Makassar memiliki mata pencaharian sebagai petani, pedagang, pelaut, dan buruh. Salah satu tanaman yang menguntungkan di masa NIT (Negara Indonesia Timur) adalah kelapa, besarnya potensi kelapa terlihat dengan besarnya ekspor kopra yang keluar dari pelabuhan Makassar pada tahun 1949 berjumlah 21.384.475 kg untuk wilayah Sulawesi Selatan. Akibat faktor keamanan di tahun 1950 ekspor menurun drastis, namun kopra tetap menyumbang 18.635.435 kg. Selain itu bertenen juga merupakan salah satu industri rumah tangga yang dilakukan oleh penduduk, di masa NIT diperlukan benang tenun sekitar 15.630 kg setahun, yang tersebar ke 17 sentra industri tenun di rumah tangga di Sulawesi Selatan. Bagi penduduk yang tidak memiliki tanah pertanian mereka menerima upah sebagai buruh tani, bekerja di fasilitas lalu lintas, pengairan, kehutanan, buruh kebun, tukang jahit, atau tukang binatu.<sup>75</sup>

Keberadaan Kota Makassar sebagai sebuah pusat kegiatan ekonomi serta menjadi satelit (*hub*) di Indonesia bagian Timur. Maka dengan adanya hal tersebut

---

<sup>73</sup> Adil Akbar, Perdagangan Beras Di Sulawesi Selatan 1947-1956, *Jurnal Pattinooloang*, Vol.3 No2, 2016, 6.

Moh. Hatta, *Dengan Kabut dan Cahayanya: Masa Awal Kemerdekaan* LP3ES, 1981), 115–120.

J.R. Chaniago, “*Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia: Peranan Lokal dalam Dinamika Politik di Sulawesi Selatan dan Sumatera Timur*” (Disertasi Universitas Gadjah Mada, 2002): 83-86.



menjadikan sebagai daya tarik bagi para pendatang dan mempercepat status Kota Makassar sebagai sebuah Kota Metropolitan.<sup>76</sup>

Di tahun 1970 pihak dari pemerintah pusat memberi bantuan pembangunan untuk setiap kabupaten dan kotamadya sebanyak Rp 50 perkapita, dari bantuan tersebut bantuan yang diterima kota Makassar mendapatkan dana sebanyak Rp. 21.147.000, selanjutnya pada tahun 1971 mendapat dana bantuan sebesar Rp. 34.350.000, kemudian ditahun 1972 mendapatkan sebesar Rp. 47.400.000, dan kemudian di tahun 1973 pemerintah pusat memberikan lagi dana bantuan untuk kota Makassar sebesar Rp. 67.283.206.<sup>77</sup>

Pertumbuhan ekonomi kotamadya ujungpandang rata-rata dicapai 5.68% pertahun (PDRB 1983-1986) yang sebagian besar ditunjang dari sektor perdagangan angkutan/komunikasi, jasa dan sektor industri penyediaan fasilitas ekonomi kota semakin meningkat dalam menunjang kegiatan masyarakat warga kota sendiri maupun terhadap usaha-usaha yang menunjang kegiatan ekonomi regional dan wilayah.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar tidak lepas dari adanya proses migrasi, dimana migrasi mengacu pada perkotaan yang cenderung sub urban.<sup>78</sup> Tersedia sarana dan prasarana perkotaan sebagai hasil Pembangunan yang semakin meningkat telah memberikan peluang yang cukup besar bagi pengembangan

---

<sup>76</sup> Asmunandar, Re-Identitas Kota Lama, 4.

H.M.Dg. Patompo, “*Menyikap Tabir Kegelapan: Fragmen Revolusi unan*”. (Ujung Pandang : Percetakan SMP Frater Ujung Pandang, 1976):

La Ode Sir Muhammad Iqbal, *et. al*, Kutub Pertumbuhan dan Gentrifikasi vasan Pinggiran Kota Makassar, *URSJ*, Vol.3 No.1, 2020, 15-16.



kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat perkotaan, bahkan untuk penduduk sekitarnya.

Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, disebabkan oleh adanya sektor industri dan perdagangan, dalam bidang ekonomi mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Sehingga dapat menciptakan lapangan usaha serta perluasan kerja dan meningkatnya pendapatan. Hal tersebut dapat dilihat pada pesatnya nilai perdagangan Kota Makassar. Peranan Kota Makassar dalam bidang perdagangan dan pelayaran niaga yang memiliki pelabuhan laut sehingga dapat menciptakan masyarakat maritim, serta kehidupan masyarakatnya bergerak dalam bidang perdagangan. Kota Makassar merupakan salah satu pusat pelayanan di wilayah Indonesia Bagian Timur yang memiliki peran dalam pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan. Dari hal tersebut menjadikan sebagai salah satu faktor penarik bagi para migran.<sup>79</sup>

Meski angka pertumbuhan ekonominya tidak melulu bergerak dengan grafik meningkat, pendapatan perkapita Kota Makassar menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Contohnya jika pada tahun 1993 pendapatan perkapita hanya Rp.1.588.534 maka di tahun 1997 (dalam statistik yang dipublikasikan pada tahun 1998) naik menjadi Rp.2.669.734.<sup>80</sup>



Taufik Chandra, *et al.*, Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Potensial Sektor Potensial Di Kota Makassar, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 1 Alauddin Makassar): 15-16.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, *Kotamadya Ujung Pandang 1998*, (Ujung Pandang: BPS Kotamadya Ujung Pandang, 1999): 270.

Kondisi sosial Kotamadya Ujung Pandang memiliki ciri majemuk, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan adat istiadat serta budaya yang beraneka ragam. Penduduk Kotamadya Ujung Pandang mayoritas beragama islam sekitar 86% (Tahun 1986) dan selebihnya adalah pemeluk agama kristen protestan, katolik, hindu dan Budhha. Potensi pengembangan sosial budaya sudah cukup besar dengan tersedianya sarana dan prasarana Pendidikan berupa sekolah umum, sekolah kejuruan dan perguruan tinggi.<sup>81</sup>

Perkembangan kota melalui pembangunan fisik kota secara besar-besaran pada masa Orde Baru melahirkan permasalahan yang semakin kompleks dan sulit terpecahkan. Di Kota Makassar, permasalahan tersebut tampak dengan nyata baik pada lingkungan (fisik) kota maupun pada permasalahan sosial masyarakat. Permasalahan terutama dirasakan oleh penduduk kota yang tidak mampu menghadapi dan mengambil keuntungan dari perubahan yang terjadi.<sup>82</sup> Pada masa Orde Baru, kriminalitas berkembang dari ‘kegagalan’ modernisasi meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk yang mengakibatkan meluasnya ketimpangan sosial, kemiskinan, dan pengangguran.<sup>83</sup>

Namun demikian ditinjau dari struktur sosial ekonomi masyarakat dalam usaha-usaha pengembangan keterampilan dan pengembangan tenaga-tenaga

---

<sup>81</sup> Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, *Pola Dasar Pemerintahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang 1900 – 1993/1994*, (Makassar, 2002), 3.

Ilham Daeng Makkelo, “Penyeragaman dan Wajah Buram Modernitas di Makassar Pada Masa Orde Baru”, *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol.4 No. 1,

Ilham Daeng Makkelo, *Wajah Buram Modernitas*, 27.



profesional masih ditemui hambatan-hambatan yang pada umumnya dialami golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.<sup>84</sup>

## 2.4 Industrialisasi dan Urbanisasi

Industrialisasi dan urbanisasi adalah dua proses yang saling terkait dan memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu negara. Industri mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan dibidang ekonomi yang bersifat produktif.<sup>85</sup> Dapat dikatakan bahwa industrialisasi sebagai transformasi struktural dalam suatu negara. Oleh sebab itu, proses industrialisasi dapat didefenisikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi dimana terdapat kenaikan kontribusi sektor industri dalam permintaan konsumen, PDB, ekspor dan kesempatan kerja.<sup>86</sup>

Industrialisasi dalam pengertian lain adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang mempunyai kaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai *leading sector*; maksudnya adalah dengan adanya perkembangan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> Suparmono, "Impact of Job Skills Training Programs on Urban Poverty," *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* 13, no. 1 (2021): 6.

<sup>85</sup> Arsyad, L, "Ekonomi Pembangunan". (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu , 2004).

Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi karta: Erlangga, 2011, 322.

Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*.



Pengembangan kawasan industri memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang mengatur pengembangan kawasan industri, yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996, merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mendorong masuknya investasi di sektor industri.<sup>88</sup> Selain itu, kebijakan ini juga memberikan kepastian hukum serta mengatur pengelolaan kawasan industri di berbagai daerah. Namun, hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan kawasan industri adalah pengendalian dan pengawasan terhadap konversi lahan pertanian yang berlebihan, yang bisa terjadi akibat kebutuhan untuk menyediakan lahan bagi pembangunan kawasan industri dan perumahan.<sup>89</sup>

Pada masa Orde Baru, rencana pembangunan kota berdasar pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dimulai pada masa pemerintahan Muhammad Daeng Patompo Walikota Makassar pada tahun 1965-1970. Upaya pembangunan kota dan peningkatan pola kehidupan sosial masyarakat Kotamadya Makassar dikenal sebagai program pemberantasan 3K (kemelaratan, kebodohan dan kemiskinan). Tujuan dari penyusunan program tersebut adalah untuk memperbaiki tindakan pemerintah khususnya kriminalitas yang terus meningkat dan kondisi ruang kota yang memburuk.<sup>90</sup>

Kota Makassar terbagi menjadi kota lama sebagai kawasan perdagangan, kawasan Panakukkang atau *Panakukkang Garden City* sebagai kawasan perkantoran



Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Industri*, diundangkan pada 4 Juni 1996, Pasal 3 ayat (1)–(2).

Sadono Sukirno, *Beberapa Aspek dalam Persoalan Pembangunan* Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1976), 79–80.

Ilham Daeng Makkelo, *Wajah Buram Modernitas*, 17.

dan pemukiman, kawasan Biringkanaya Timur sebagai kawasan pendidikan, dan kawasan Biringkanaya Utara sebagai kawasan industri. Daerah Mariso, dan pulau-pulau di sekitar Selat Makassar sebagai kawasan pariwisata. Kawasan pertanian pemukiman, pertokoan dan perkantoran, tambak dan rawa menjadi bangunan industri.<sup>91</sup> Peningkatan infrastruktur ini, pada gilirannya, turut mendukung perkembangan sektor pariwisata, dengan kemudahan akses, fasilitas yang lebih baik, serta munculnya destinasi-destinasi wisata baru yang menarik.<sup>92</sup> Keterkaitan antara industrialisasi dan pariwisata ini semakin memperkuat posisi Makassar sebagai pintu gerbang ekonomi di Indonesia bagian timur, sekaligus menjadikannya sebagai tujuan wisata yang semakin diminati.<sup>93</sup>

Kota Makassar disamping sebagai daerah industrialisasi merupakan juga daerah yang memiliki obyek-obyek wisata seperti pulau Lae-Lae, pulau samalona, pulau Kayangan, Pulau Barranglompoa, pulau Barrangcaddi, pulau kodingareng, pantai Barombong, museum Lagaligo dan lain-lain. Sedaangkan sarana penunjangnya adalah hotel 38 buah, penginapan/losmen 12 buah, wisma/pondok 22 buah, selain itu terdapat 44 buah restoran dan rumah makan.<sup>94</sup>

---

<sup>91</sup>Juhana Said. "Perubahan Fungsi Lansekap terhadap Peningkatan Temperatur Udara di Lingkungan Kota Makassar". *Jurnal Arsitektur, Kota dan Permukiman (LOSARI)*, 18-19.

<sup>92</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010–2025* (Jakarta: Krekraf, 2010), 92.

Pemerintah Kota Makassar, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Makassar 2016–2021* (Makassar: Bappeda Makassar,

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, 4.



Kota dagang yang tergantung pada satu sektor industri dapat mencari alternatif dalam mencari sumber pendapatan. Pengembangan sektor pariwisata dapat menjadi solusi untuk mencapai tujuan ini. Kota industri yang menarik wisatawan dapat membuka peluang ekonomi baru dan mengurangi ketergantungannya pada satu sektor industri tertentu. Industri pariwisata melibatkan penyediaan jasa-jasa yang berkaitan dengan kegiatan wisata, tempat-tempat menarik, dan fasilitas wisata. Tujuan utama dari industri pariwisata adalah untuk menarik minat pelaku usaha dan dianggap sebagai hal penting dalam mengembangkan ekonomi daerah sebagai destinasi wisata.<sup>95</sup>

Derap pembangunan terus mengeliat begitu dekade 1980-an dimulai. Suatu rencana yang berkaitan dengan memenuhi kebutuhan penduduk kota soal sarana rekreasi, tamasya, olahraga, dan lain-lain. Sebuah impian baru dirancang dengan rencana pembangunan “Taman Impian Tanjung Bunga” Ujung Pandang. Dengan meniru beberapa aspek Taman Impian Jaya Ancol, dan beberapa tempat rekreasi lainnya di Indonesia, seperti Pantai Kuta di Bali, Prapat di Sumatra, walaupun dalam wujud yang lebih kecil. Di bangun di kawasan delta Sungai Jeneberang, dataran yang dianggap tanah negara, walaupun disekitarnya terhampar empang dan tanah yang dikuasai penduduk lokal. Impian pemerintah kota dengan proyek ini adalah mewujudkan kota Makassar menjadi kota “anging mammiri” di era lebih modern.<sup>96</sup>



Ahsanul Fathiyatun Nisa dan Ragil Haryanto. “Kajian Keberadaan Belanja Malioboro terhadap pertumbuhan Jasa Akomodasi di Jalan Ayan dan Jalan Dagen”. *Jurnal Teknik PWK*, Vol. 1 No. 3, 2014, 939.

Ilham Daeng Makkelo, “Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Pada Abad ke-20”, *Jurnal Sejarah*. Vol. 1(2), 2018, 59.

Dalam ilmu lingkungan, urbanisasi dapat diartikan sebagai proses pengkotaan suatu wilayah. Ditinjau dari rangkaian kata, urbanisasi berasal dari kata “Urban” yang berarti kota, dan imbuhan *nisasi* memberikan makna membuat jadi kota. Dari pengertian tersebut tidak ada sama sekali unsur perpindahan (migrasi) pada kata tersebut. Istilah urbanisasi bagi sebagian besar orang awam dan beberapa kalangan memiliki definisi perpindahan penduduk dari desa ke kota.<sup>97</sup>

Hubungan industrialisasi dengan urbanisasi sangat erat karena dapat dipahami melalui berbagai aspek yang saling mempengaruhi dalam perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara. Salah satu dampak signifikan dari industrialisasi adalah urbanisasi, yakni perpindahan penduduk dari desa ke kota-kota besar yang biasanya menjadi pusat kegiatan industri.<sup>98</sup>

Urbanisasi terjadi karena adanya perubahan dalam struktur ekonomi. Ketika industri berkembang, infrastruktur kota pun diperbarui dan diperluas. Pembangunan transportasi, sistem komunikasi, dan fasilitas publik menjadi lebih baik, menjadikan kota-kota lebih menarik bagi penduduk pedesaan yang ingin meningkatkan taraf hidup mereka.<sup>99</sup>

Pertumbuhan jumlah penduduk yang terjadi di Kota Makassar bukan hanya disebabkan oleh faktor kelahiran di daerah tersebut, namun juga dipengaruhi oleh faktor urbanisasi. Salah satu alasan utama perpindahan tersebut adalah untuk mencari

---

<sup>97</sup> Dwi C.P, “*Urbanisasi dan Permasalahannya*”. (Semarang : Alprin, 2019),



Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi karta: Erlangga, 2011, 348.

Pacione, Michael. *Urban Geography: A Global Perspective*. 2nd ed. Routledge, 2005, 219.

peluang pekerjaan yang lebih baik, yang memang lebih banyak tersedia di kota besar seperti Makassar. Proses urbanisasi ini membuat banyak individu atau keluarga memutuskan untuk menetap di kota, berharap dapat meningkatkan kualitas hidup mereka melalui akses yang lebih baik terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan ekonomi.<sup>100</sup>

Modernitas di Kota Makassar tidak memperlihatkan bentuk yang tunggal, tetapi justru memperlihatkan wajah beragam. Wujud maupun perubahannya berlangsung pada satu fase tertentu maupun pada periode yang berbeda. Terutama pada tiga aspek yang saling terkait yakni ruang fisik kota, manusia dan masyarakat modern, serta ironi atau persoalan masyarakat perkotaan yang muncul sebagai akibat proses modernisasi. Modernisasi sebagai pengalaman sejarah diperoleh melalui proyek-proyek modern yang nyata, serta dalam imaji dan impian.<sup>101</sup>

Kegiatan industrialisasi yang pesat di suatu daerah seringkali menjadi salah satu faktor utama penyebab urbanisasi. Proses industrialisasi yang melibatkan pembangunan pabrik-pabrik dan sektor industri lainnya menciptakan peluang kerja yang lebih banyak dan menarik bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau daerah dengan sedikit kesempatan ekonomi. Banyak orang dari desa atau daerah terpencil akhirnya pindah ke kota-kota besar dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup mereka. Keberadaan kawasan industri di kota-kota besar tidak hanya menawarkan lapangan pekerjaan,



---

<sup>0</sup> BPS Kota Makassar, *Kota Makassar dalam Angka 2023* (Makassar: Pusat Statistik, 2023), 11.

<sup>1</sup> Ilham Daeng Makkelo, “Menjadi Kota Modern : Transformasi Kota Pada Abad Ke-20”. *Jurnal Sejarah*. Vol 1. No. 2, 2018, 54-60.

tetapi juga fasilitas yang lebih modern dan peluang pendidikan serta kesehatan yang lebih baik.<sup>102</sup> Oleh karena itu, industrialisasi berperan penting dalam memindahkan populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan, mengubah struktur sosial dan ekonomi suatu daerah, serta menyebabkan pertumbuhan pesat jumlah penduduk di kota-kota industri.<sup>103</sup>

Urbanisasi sebagai sebuah proses, mengindikasikan proses perubahan kawasan pinggiran dari rural menjadi urban. Dengan demikian proses urbanisasi yang terjadi dalam dinamika perkembangan Kota Makassar telah menempati hampir di beberapa kawasan kota termasuk pada kawasan Tanjung Bunga sebagai kawasan potensial untuk pengembangan kawasan ekonomi strategis Kota Makassar. Pesatnya pembangunan pada kawasan tersebut dianggap sebagai pemicu yang mendorong proses terjadinya daya tarik urbanisasi menuju ke kawasan Metro Tanjung Bunga. Proses perkembangan kawasan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar saat ini, diidentifikasi berdampak pada tingginya kepadatan penduduk, yang secara simultan telah mengakibatkan munculnya masalah-masalah sosial baru dan perubahan sosial dalam dinamika kehidupan sosial komunitas lokal.<sup>104</sup>

Modernisasi kawasan Metro Tanjung Bunga mengindikasikan proses perubahan sosial pada komunitas lokal, ditandai dengan perubahan moda produksi yang didukung dengan perkembangan teknologi dan transportasi. Dominasi

---

<sup>102</sup> Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke-12 Jakarta: Erlangga, 2011, 350.

<sup>3</sup> Pacione, Michael. *Urban Geography: A Global Perspective*. 2nd ed. Routledge, 2005, 221.

<sup>4</sup> Batara Surta dan Patmawaty Taibe, “*Transformasi Spasial dan in Sosial Komunitas Lokal Perspektif Dinamika Pembangunan Kawasan u*” (Makassar: Chakti Pustaka Indonesia, 2022), 3.



penguasaan moda produksi oleh kapitalisme mengindikasikan proses perubahan sosial dalam dinamika kehidupan sosial komunitas lokal, dan berkorelasi secara positif terhadap sistem sosial, pola hubungan sosial, interaksi sosial, sosialisasi, sistem kelembagaan, dan proses perubahan sosial komunitas itu sendiri. Dengan demikian, modernisasi yang didorong oleh proses urbanisasi secara simultan mengondisikan perubahan sosial pada komunitas lokal ditandai dengan perubahan sistem sosial, struktur sosial, pranata sosial dan pola kultural.<sup>105</sup>



---

Batara Surta dan Patmawaty Taibe, *Transformasi Spasial*, 15-17.